



Gubernur: Ruas Jalan Sintang-Semubuk

Sambungan Hal.1

bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar telah berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan terhadap ruas jalan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk jalan Sintang - Semubuk. Dimana jalan-jalan itu kini masih terus dilakukan perbaikan secara bertahap.

"Bahwa Gubernur Kalimantan Barat tidak pernah merampot (berbohong) dalam hal penangan jalan. Hal ini dibuktikan dengan fokusnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi," ujarnya, Jumat 28 Oktober 2022.

Iskandar kembali menjelaskan, mengingat posisi APBD Provinsi Kalbar yang tidak memadai, maka perbaikan atau pembangunan jalan yang ada itu pun tidak dapat dilakukan secara sekaligus. "Kita ambil contoh untuk ruas jalan Sintang - Semubuk, sejak tahun 2019 telah ditangani secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah provinsi," terangnya.

Dengan rinci Iskandar menjelaskan, bahwa penanganan ruas jalan Sintang - Semubuk pada tahun 2019 telah dianggarkan sebesar Rp 11,614.300.00.

Kemudian pada tahun 2020, terjadi refocusing (pengalihan) anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 Kalbar, sehingga ditunda penganggarannya.

Namun pada tahun 2021, penganggaran tersebut kembali dilanjutkan dengan nilai total sebesar Rp 35,5 miliar, kemudian pada tahun 2022 sebesar Rp 16,88 miliar dan tahun 2023 juga diusulkan penanganannya sebesar Rp 18 miliar.

Dengan kata lain, Iskandar mengharapkan masyarakat dapat memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Kalbar saat ini. "Penanganan ruas jalan di Kalimantan Barat yang belum mantap itu sekitar 499.065 km-dalam kondisi keuangan terbatas tentunya diperlukan strategi penangan yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, lanjut Iskandar, pihaknya juga telah berupaya melakukan tata kelola keuangan secara ketat dan semaksimal mungkin mengelola anggaran tersebut dengan mempertimbangkan aspek skala prioritas.

Artinya dengan anggaran yang minimal, PUPR harus cermat dan tepat membagi rata pembangunan di seluruh daerah, tak hanya

Sintang. "Apabila kami menangani jalan dengan mekanisme parsial (spot-spot) sesuai keluhan masyarakat, kami tidak akan dapat menyelesaikan masalah jalan mantap secara baik, dan menjadikan anggaran yang dikeluarkan akan boros dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat pemanfaat jalan," jelasnya.

Selain itu, Iskandar juga mengharapkan adanya kesadaran pemanfaat jalan khususnya angkutan perkebunan sawit, jangan dipaksakan pada saat jalan dalam kondisi fungsional baik dilewati dengan beban-beban dengan tonase yang besar, yang mana hal bisa berdampak pada rendahnya pelayanan fungsional jalan untuk masyarakat umum.

Kepada masyarakat pula, Iskandar kembali meminta, hendaknya bisa lebih bijak dalam memandang masalah dan bersabar untuk mendapat layanan jalan yang lebih layak "Kami tetap berusaha secara maksimal dalam mengusahakan dukungan anggaran ke pemerintah pusat, agar penanganan jalan di ruas-ruas yang panjang dan kondisi rusak berat dapat ditangani secara optimal," pungkasnya. **(ang)**